



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja



**KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN MUTU**

www.ombudsman.go.id

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama Manajemen Mutu merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Unit Kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Biro diukur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama Manajemen Mutu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai sarana evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Unit Kerja dalam upaya penyempurnaan kinerja di tahun mendatang. Semoga pencapaian kinerja Keasistenan Utama Manajemen Mutu berdampak positif guna mengawal kualitas pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman RI bagi perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Januari 2025

Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu

#

Awidya Mahadewi, SS, MAP

Ringkasan Eksekutif

Keasistenan Utama Manajemen Mutu (KUMM) memiliki tugas melakukan penjaminan mutu serta penanganan aduan pelanggaran internal terkait kinerja pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi. Pada Tahun 2025, KUMM yang terdiri dari 8 Asisten melaksanakan tugas tersebut dengan dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada penyesuaian target serta metode pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan penjaminan mutu. Meskipun demikian, KUMM mampu menjaga kinerja secara efektif, yang tercermin dari tercapainya seluruh indikator lembaga dan Sasaran Kegiatan (*Output*) unit kerja, yaitu Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman (100,54%), Jumlah aduan terkait pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI (121%), Jumlah laporan penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat yang dilaksanakan (100%), Jumlah laporan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi yang dilaksanakan (100%), serta Rata-rata waktu penyelesaian aduan (100,88%).

Daftar Isi

Kata Pengantar	0
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	5
1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
BAB II RENCANA KERJA	9
2.1. Perjanjian Kinerja.....	9
2.2. Penetapan Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	15
3.2. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dibentuk dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik.

Kemudian, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dalam menjalankan fungsi dan untuk mencapai tujuannya, Ombudsman melaksanakan tugas pokok pengawasan pelayanan publik melalui cara diantaranya yaitu menerima, menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan masyarakat, serta melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan pembentukan Ombudsman RI dan berhasil menjalankan tugas dan fungsinya, maka, Ombudsman RI menjalankan tata kelola yang dituangkan dalam kebijakan dan didukung dengan serangkaian prosedur. Ombudsman RI perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi standar dan regulasi yang telah ditentukan, sehingga tidak berbagai bentuk hambatan dan penyelewengan yang dapat menghambat keberhasilan Ombudsman RI dicegah dan diminimalisir.

1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia, Keasistenan Utama Manajemen Mutu yang kemudian disebut dengan KUMM bertugas melakukan evaluasi kepatuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman dalam lingkup penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi agar sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku di Ombudsman, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan di bidang manajemen mutu penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran di bidang pengaduan masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan pelaksanaan tugas manajemen mutu pengawasan pelayanan publik;
- d. melakukan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan ketentuan pada ranah penyelesaian laporan masyarakat maupun pencegahan maladministrasi.
- e. melakukan evaluasi terhadap petunjuk teknis dan standar prosedur pada ranah penyelesaian laporan masyarakat maupun pencegahan maladministrasi;
- f. menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja dalam penanganan laporan dan pencegahan maladministrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

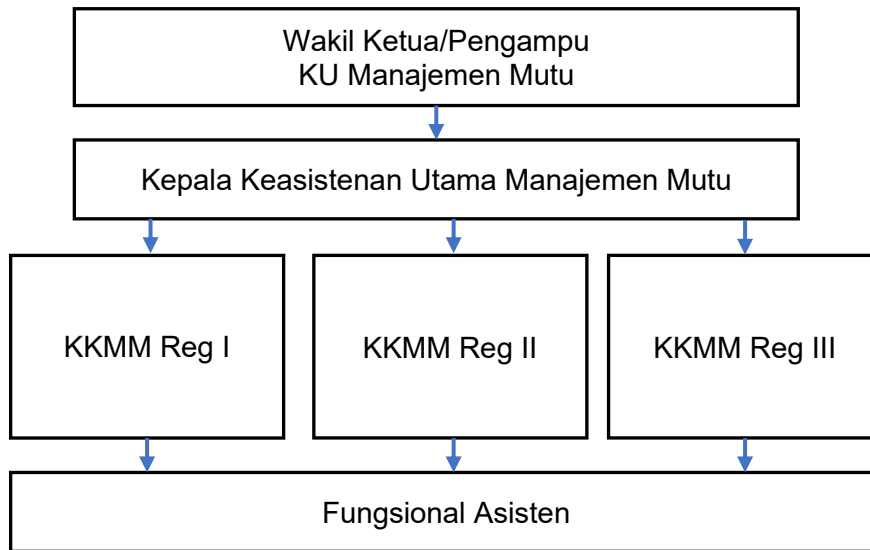
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Keasistenan Utama Manajemen Mutu (KUMM) melakukan evaluasi terhadap kepatuhan unit kerja di lingkungan Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Internal. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUMM melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran internal yang disampaikan oleh masyarakat melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS), khususnya yang berkaitan dengan

kinerja pengawasan Ombudsman dalam kegiatan penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.

KUMM berpedoman juga pada Peraturan Ombudsman Nomor 51 Tahun 2020 tentang Manajemen Mutu Terpadu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, serta Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu atas kegiatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi guna memastikan kesesuaian proses dan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Laporan, KUMM juga dapat melaksanakan *clearance* terhadap rancangan Rekomendasi Ombudsman.

1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, KUMM diampu oleh Wakil Ketua Ombudsman yang menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Keasistenan Utama Manajemen Mutu. KUMM dipimpin oleh seorang Kepala dengan jenjang Asisten Utama dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Keasistenan Regional yang bertugas melakukan pengawasan mutu pada wilayah regional yang telah ditetapkan. Adapun Struktur Organisasi KUMM yang merupakan bagian dari susunan organisasi Keasistenan yang di atur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:



Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Regional Keasistenan Utama Manajemen Mutu, seluruh unit kerja keasistenan di Ombudsman di bagi ke dalam 3 (tiga) wilayah regional sebagai berikut:

Regional I	Regional II	Regional III
1. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring	1. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi	1. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
2. Keasistenan Utama I	2. Keasistenan Utama II	2. Keasistenan Utama III
3. Keasistenan Utama VI	3. Keasistenan Utama V	3. Keasistenan Utama IV
4. Keasistenan Utama VII	4. Perwakilan Aceh	4. Perwakilan Sumatera Utara
5. Perwakilan Kepulauan Riau	5. Perwakilan Riau	5. Perwakilan Bengkulu
6. Perwakilan Jambi	6. Perwakilan Sumatera Selatan	6. Perwakilan Banten
7. Perwakilan Bangka Belitung	7. Perwakilan Lampung	7. Perwakilan Jawa Tengah
8. Perwakilan Jakarta Raya	8. Perwakilan Sumatera Barat	8. Perwakilan Bali
9. Perwakilan DI Yogyakarta	9. Perwakilan Jawa Timur	9. Perwakilan Kalimantan Selatan
10. Perwakilan Jawa Barat	10. Perwakilan Kalimantan Timur	10. Perwakilan Kalimantan Tengah
11. Perwakilan Kalimantan Barat	11. Perwakilan Sulawesi Selatan	11. Perwakilan Sulawesi Barat
12. Perwakilan Kalimantan Utara	12. Perwakilan Sulawesi Tenggara	12. Perwakilan Sulawesi Utara
13. Perwakilan Sulawesi Tengah	13. Perwakilan Nusa Tenggara Timur	13. Perwakilan Nusa Tenggara Barat
	14. Perwakilan Maluku	

Regional I	Regional II	Regional III
14. Perwakilan Gorontalo 15. Perwakilan Papua	15. Perwakilan Papua Barat	14. Perwakilan Maluku Utara.

Sumber daya manusia di Keasistenan Utama Manajemen Mutu berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang Asisten Utama, 7 (tujuh) orang asisten Muda, dan 1 (satu) orang Asisten Pratama. Komposisi tersebut sangat belum ideal karena beberapa asisten tersebut juga menjalankan fungsi manajerial pada Keasistenan Utama dan selain itu belum terdapat asisten pada jenjang madya di KUMM. Jabatan Keasistenan di lingkungan Ombudsman belum dilakukan evaluasi sehingga belum memperoleh kelas jabatan, atas dasar tersebut maka masih dilakukan penggabungan fungsi, dimana asisten yang diberikan tugas manajerial masih melekat status jabatan fungsionalnya.

Komposisi Asisten berdasarkan penugasan Manajerial

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Keasistenan Utama	1 orang
2.	Kepala Keasistenan Regional	3 orang
3.	Asisten Fungsional	5 orang

KUMM menempati ruangan kerja di lantai 1 (satu) gedung Ombudsman RI, JL. HR Rasuna Said, Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan dengan dilengkapi sarana prasarana kerja yang cukup memadai seperti Laptop, Printer, *Scanner*, Telepon, Monitor, AC, sambungan internet, sambungan telepon, lemari pendingin, meja, dan kursi kerja.

BAB II

RENCANA KERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025–2029, KUMM melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi organisasi. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Program Kegiatan Manajemen Mutu, telah dirumuskan ke dalam sasaran kegiatan beserta indikator dan target kinerja yang ditetapkan berikut ini:

Program Kegiatan	Indikator/ Sasaran Kegiatan (Output)	Target					Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	
Manajemen Mutu	Indikator:						
	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%	99%	99%	99%	99%	Ombudsman
	Rata-rata waktu penyelesaian aduan	46,77 hari	45,98 hari	45,20 hari	44,41 hari	43,63 hari	Ombudsman
	Sasaran Kegiatan (Output):						
	Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan	70 orang	75 orang	80 orang	85 orang	90 orang	KUMM
	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	20 laporan	23 laporan	26 laporan	29 laporan	32 laporan	KUMM
Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu terkait Pencegahan Maladministrasi	10 laporan	12 laporan	14 laporan	16 laporan	18 laporan	KUMM	

Setiap indikator/sasaran kegiatan (*output*) dihitung berdasarkan data yang bersumber dari KUMM dan diperoleh nilainya dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator/ Sasaran Kegiatan (Output)	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
<p>Terimplementasinya Mutu Baku dan Kinerja Pelayanan Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku</p>	<p>Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman</p>	<p>Definisi Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan validitas mutu produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman dari sisi minimnya tingkat kesalahan mutu. • Diukur berdasarkan jumlah temuan utama dan jumlah temuan tambahan atas hasil pemeriksaan Aduan Pelanggaran Internal (WBS) terhadap aduan pada ranah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman terkait kegiatan penyelesaian laporan, IAPS, Kajian Pencegahan Maladministrasi, dan Opini. <p>Formula Perhitungan:</p> <p>Temuan Utama adalah temuan yang terbukti dari pokok aduan yang dikeluhkan oleh Pengadu (Bobot nilai setiap temuan utama = 1)</p> <p>Temuan Tambahan adalah temuan lain selain temuan utama yang diperoleh dalam pemeriksaan Aduan (Bobot nilai setiap temuan tambahan = 0.2)</p> $V = 100\% - \frac{\text{Total bobot temuan}}{\text{Total produk yang dihasilkan}}$ <p><i>V: Tingkat validitas mutu</i></p> <p>*Jumlah laporan yang ditutup adalah yang ditutup di SIMPeL sesuai dengan periode perhitungan temuan.</p>	<p>KUMM</p>

Sasaran Strategis	Indikator/ Sasaran Kegiatan (Output)	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
	Rata-rata lama penyelesaian aduan	<p>Definisi Operasional: Rata-rata waktu penyelesaian aduan dimulai dari diterimanya aduan sampai dengan diselesaikannya aduan.</p> <p>Formula Perhitungan: $\bar{x}WLA = WLA_1 + WLA_2 + WLA_3 + \dots + WLA_n$ </p> <p>$\bar{x}WLA$ = Rata-rata penyelesaian aduan WLA_n = Waktu penyelesaian aduan n</p>	KUMM
	Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan	<p>Definisi Operasional: Satuan Aduan merupakan layanan aduan terkait pelayanan pengawasan Ombudsman, data diperoleh berdasarkan jumlah aduan terkait pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI yang diselesaikan sampai pada tahap diterbitkannya Laporan Hasil Penyelesaian Aduan (LHPA).</p> <p>Formula Perhitungan: Aduan = \sum aduan yang diselesaikan</p>	KUMM
	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	<p>Definisi Operasional: Satuan Laporan merupakan laporan kegiatan layanan pengendalian mutu penyelesaian laporan masyarakat Data diperoleh berdasarkan laporan hasil pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat.</p> <p>Formula Perhitungan: $LPMP = \sum$ laporan penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat yang disusun.</p>	KU MM

Sasaran Strategis	Indikator/ Sasaran Kegiatan (Output)	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu terkait Pencegahan Maladministrasi	<p>Definisi Operasional: Satuan Laporan merupakan laporan kegiatan layanan pengendalian mutu pencegahan maladministrasi, data diperoleh berdasarkan laporan hasil pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu pencegahan maladministrasi</p> <p>Formula Perhitungan: LPMPC = \sum laporan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi yang disusun</p>	KUMM

2.2. Penetapan Kinerja

Memerhatikan sasaran strategis Ombudsman, ditetapkan target kinerja Ombudsman Tahun 2025 yang berkaitan dengan Program Kegiatan Manajemen Mutu. Terdapat 2 (dua) Indikator dari sasaran strategis organisasi pada Program Kegiatan Manajemen Mutu yang termasuk ke dalam target Ombudsman Tahun 2025.

Target Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 terkait Program Kerja Manajemen Mutu

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%
	Rata-rata lama penyelesaian aduan	46,77 hari

Adapun Program Kerja Manajemen Mutu yang menjadi target kinerja KUMM adalah terkait dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (*Output*), yaitu:

Target Kinerja KUMM Tahun 2025
terkait Program Kerja Manajemen Mutu

Sasaran	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)	Target
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Ombudsman yang diselesaikan	70 aduan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan	20 laporan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	10 laporan

Sehubungan pemberlakuan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian dan Lembaga, pagu efektif Keasistenan Utama Manajemen Mutu (KUMM) yang semula sebesar Rp 1.518.898.000 menjadi sebesar Rp. 18.305.000. Pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan persetujuan buka blokir anggaran Ombudsman RI TA 2025 dari Kementerian Keuangan, anggaran KUMM disetujui untuk dibuka blokir sekitar 42,10% dari pagu awal, sehingga anggaran KUMM menjadi Rp. 650.070.842. Kebijakan tersebut telah menghambat proses kerja KUMM terutama pada Rincian Output Unit Kerja Yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Unit Kerja Yang Dilakukan Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi, yang menyebabkan target kedua kegiatan tersebut tidak dapat tercapai.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KUMM dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu pada waktu efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Metode pelaksanaan dilaksanakan secara *Hybrid*, yang mana sebagian pemeriksaan secara langsung di kantor Ombudsman di Pusat dan sebagian lagi dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Selain itu penjaminan mutu memanfaatkan e-mail dan juga Sisdatin untuk pengiriman dokumen terkait. Proses pengujian bukti secara *online* menjadikan pelaksanaan penjaminan mutu menjadi lambat karena kendala tidak dapat mengakses

langsung dokumen dan/atau mengonfirmasi/klarifikasi langsung kepada unit yg dilakukan penjaminan mutu;

- b. Proses pengumpulan bukti secara *online* menyebabkan minimnya informasi prosedur dan dokumen tindaklanjut karena potensi tidak lengkapnya dokumen /informasi yang disampaikan oleh unit kerja.

Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas KUMM meminta penyesuaian Target Kinerja Tahun 2025.

Penyesuaian Target Kinerja KUMM Tahun 2025
pada Program Kerja Manajemen Mutu

Sasaran	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)	Target
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Ombudsman yang diselesaikan	70 aduan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan	8 laporan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	4 laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Target Kinerja Tahun 2025 yang telah ditentukan, KUMM melakukan kegiatan dan penyesuaian agar tetap dapat mencapai target kinerja. Berikut data realisasi dan capaian Program Kegiatan Manajemen Mutu yang merupakan target Lembaga (Ombudsman) dan unit kerja (KUMM) pada tahun 2025:

Capaian Kinerja Ombudsman Tahun 2025
terkait Program Kerja Manajemen Mutu

Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%	99,53%	100,54%	<p>Terdapat 22 temuan utama dan 96 temuan tambahan. Setelah dilakukan pembobotan, bobot temuan utama menjadi 22 dan temuan tambahan menjadi 19,2. Sehingga total bobot temuan adalah 41,2.</p> <p>Total laporan yang ditutup (produk yang dihasilkan adalah 8.859)</p> <p>Tingkat validitas:</p>

Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
					$V = 100\% - \frac{41,2}{8859} = 99,53\%$ <p>Sehingga capaiannya Tingkat Validitas Mutu Tahun 2025 adalah 100,54%</p>
	Rata-rata waktu penyelesaian aduan	46,77 hari	46,36 hari	100,88%	

Penjelasan:

1. Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman.

Target kinerja indikator Tingkat Validitas Mutu Ombudsman adalah minimum 99%. Tingkat Validitas Mutu menggambarkan mutu produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman atas kegiatan penyelesaian laporan ataupun kegiatan pencegahan maladministrasi. Tingkat Validitas Mutu yang tinggi menggambarkan minimnya kesalahan mutu atas produk yang dihasilkan. Realisasi kinerja Tingkat Validitas Mutu tahun 2025 adalah 99,53%. Dengan demikian, capaian indikator Tingkat Validitas Mutu Ombudsman adalah 100,54%.

2. Rata-rata waktu penyelesaian aduan.

Target kinerja indikator rata-rata waktu penyelesaian aduan tahun 2025 adalah 46,77 hari. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian aduan tahun 2025 adalah 46,36 hari, sehingga capaian kinerjanya menjadi 100,88% telah memenuhi target. Ombudsman melalui KUMM telah berupaya mencapai target dengan memastikan rata-rata waktu penyelesaian aduan memenuhi target yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 66 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Waktu Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Internal Atas Pemeriksaan dan

Penyelesaian Laporan Masyarakat, Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025.

Capaian Target Kinerja KUMM Tahun 2025 yang Telah Disesuaikan

Sasaran Kinerja	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI yang diselesaikan	70 Aduan	85 Aduan	121,43%
	Jumlah laporan penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat yang dilaksanakan	8 Laporan	8 Laporan	100%
	Jumlah laporan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Penjelasan:

1. Jumlah aduan terkait pengawasan oleh Ombudsman RI yang diselesaikan. Aduan yang diselesaikan pada tahun 2025 tidak hanya yang diterima di tahun 2025 tetapi termasuk yang diterima di tahun 2025 namun penyelesaiannya dilanjutkan di tahun 2025, berikut rinciannya:
 - a. 8 Aduan yang diterima di tahun 2024; dan
 - b. 77 Aduan yang diterima di tahun 2025.

Total Aduan yang diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebanyak 85 Aduan dari 90 Aduan yang ditangani di tahun 2025. Dengan demikian, KUMM mencapai 121,43% dari target penyelesaian Aduan tahun 2025 sebanyak 70 Aduan.

Tidak dilakukan penyesuaian Target kinerja penyelesaian Aduan KUMM di tahun 2025 dengan pertimbangan bahwa:

- a. Ombudsman tidak dapat membatasi masyarakat untuk mengadu melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) terkait keluhan terhadap kinerja pengawasan pelayanan publik;
 - b. Pemeriksaan Aduan WBS oleh KUMM terikat dengan Baku Mutu Waktu sesuai Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 66 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Waktu Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Internal Atas Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat, Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025.
2. Jumlah laporan penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat yang dilaksanakan.

Target awal jumlah laporan penjaminan mutu penyelesaian laporan yang harus dilaksanakan oleh KUMM adalah 20 (dua puluh) laporan. Berkaitan dengan adanya Efisiensi Belanja Kementerian dan Lembaga, dilakukan penyesuaian target penjaminan mutu penyelesaian laporan setelah anggaran KUMM dibuka sebesar 42,10% dari target awal. Kemudian, dilakukan perhitungan ulang target penjaminan mutu penyelesaian laporan dimana 42,10% dari 20 laporan adalah 8.42 laporan. Dengan pembulatan ke bawah, target laporan penjaminan mutu penyelesaian laporan menjadi 8 (delapan) laporan.

Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan secara *hybrid* dengan cara tatap muka langsung dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada tahun 2025, KUMM memaksimalkan pelaksanaan penjaminan mutu secara daring karena adanya keterbatasan untuk mengakses langsung dokumen fisik di lokasi unit kerja akibat keterbatasan anggaran. Untuk mendukung lancarnya kegiatan penjaminan mutu, dimaksimalkan pemanfaatan surel, Sisdatin, dan penyimpanan data *cloud*. Proses pengujian bukti secara daring membuat proses penjaminan mutu menjadi lambat karena diperlukan tambahan proses digitalisasi dokumen, penyesuaian cara kerja, serta konfirmasi/klarifikasi tidak bisa dilakukan secara tatap muka yang cenderung minim gangguan dan mudah dalam pencarian bukti dan dokumen.

Pada tahun 2025, KUMM telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan penjaminan mutu penyelesaian laporan pada triwulan III, dan 4 (empat) kegiatan lagi pada triwulan IV. Total pelaksanaan penjaminan mutu penyelesaian laporan tahun 2025 adalah 8 (delapan) kegiatan yang menghasilkan 8 (delapan) laporan. Dengan demikian, KUMM telah mencapai 100% dari target kinerja pelaksanaan penjaminan mutu penyelesaian laporan yang telah disesuaikan di tahun 2025.

3. Jumlah laporan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi yang dilaksanakan.

Target awal jumlah laporan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi yang harus dilaksanakan oleh KUMM adalah 10 (sepuluh) laporan. Seperti penjaminan mutu penyelesaian laporan, anggaran penjaminan mutu pencegahan maladministrasi juga terkena efisiensi yang hanya diberikan pagu efektif sebesar 42,10%. Dengan perhitungan yang sama, 42,10% dari 10 laporan adalah 4,21. Jika dilakukan pembulatan ke bawah, target laporan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi menjadi 4 (empat) laporan. Keterbatasan anggaran mendorong KUMM untuk memaksimalkan pelaksanaan penjaminan mutu secara daring meskipun terdapat kelambatan dan upaya lebih dalam penyesuaian pelaksanaan penjaminan mutu secara daring.

Kegiatan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi dimulai pada bulan Agustus 2025 sampai Desember 2025. Total pelaksanaan penjaminan mutu penyelesaian laporan tahun 2025 adalah 4 (empat) kegiatan yang menghasilkan 4 (empat) laporan. Dengan demikian, KUMM telah mencapai 100% dari target kinerja pelaksanaan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi yang telah disesuaikan di tahun 2025.

3.2. Realisasi Anggaran

Tahun 2025 KUMM memperoleh anggaran sebesar Rp 1.518.898.000. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L pagu efektif KUMM menjadi sebesar Rp. 18.305.000.

Pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan persetujuan buka blokir anggaran Ombudsman RI TA 2025 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp26.941.927.000 atau sekitar 42% dari pagu anggaran, maka anggaran KUMM menjadi Rp. 650.070.842, dengan rincian anggaran kegiatan:

1. Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan Rp. 110.710.260;
2. Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Rp. 340.019.132; dan
3. Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi Rp. 199.341.451.

Realisasi anggaran KUMM Tahun 2025 berdasarkan pagu efektif mencapai 98,91%, namun apabila mengacu pada total riil pagu anggaran setelah buka pemblokiran realisasi hanya mencapai 42,33%.

Realisasi Anggaran KUMM Tahun 2025

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/RO KOMPONEN SUBKOM/AKUN/DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5)=(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>110.01.CG</u>	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.518.898.000	868.827.000	650.071.000	643.013.763	98,91%	42,33%
5731	Penjaminan Mutu	1.518.898.000	868.827.000	650.071.000	643.013.763	98,91%	42,33%
5731.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	262.963.000	152.253.000	110.710.000	109.412.164	98,83%	41,61%
5731.BAA.001	Aduan terkait kinerja pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan	262.963.000	152.253.000	110.710.000	109.412.164	98,83%	41,61%
51	Penyelesaian Aduan terkait pengawasan pelayanan publik	262.963.000	152.253.000	110.710.000	109.412.164	98,83%	41,61%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/RO KOMPONEN SUBKOM/AKUN/DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5)=(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Persiapan Pemeriksaan/Penyelesaian Aduan	4.483.000	3.120.000	1.363.000	1.300.000	95,38%	29,00%
521211	Belanja Bahan	4.483.000	3.120.000	1.363.000	1.300.000	95,38%	29,00%
B	Pemeriksaan/Penyelesaian Aduan	221.760.000	112.413.000	109.347.000	108.112.164	98,87%	48,75%
521211	Belanja Bahan	7.760.000	7.413.000	347.000	302.500	87,18%	3,90%
521251	Belanja Jasa Profesi	4.000.000		4.000.000	3.600.000	90,00%	90,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	210.000.000	105.000.000	105.000.000	104.209.664	99,25%	49,62%
C	Penyusunan Laporan	36.720.000	36.720.000	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.720.000	36.720.000	0	0	-	0,00%
5731.BIC	Pelayanan Publik Lainnya	1.255.935.000	716.574.000	539.361.000	533.601.599	98,93%	42,49%
5731.BIC.001	Unit Kerja yang dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	782.452.000	442.433.000	340.019.000	338.317.624	99,50%	43,24%
51	Pemeriksaan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat	782.452.000	442.433.000	340.019.000	338.317.624	99,50%	43,24%
A	Perencanaan Umum Penjaminan Mutu	800.000	800.000	0	0	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	800.000	800.000	0	0	-	0,00%
B	Perencanaan Penugasan Penjaminan Mutu	36.720.000		36.720.000	36.585.000	99,63%	99,63%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.720.000		36.720.000	36.585.000	99,63%	99,63%
C	Pelaksanaan Penjaminan Mutu	523.440.000	404.913.000	118.527.000	118.316.030	99,82%	22,60%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	450.000.000	404.913.000	45.087.000	45.066.030	99,95%	10,01%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73.440.000		73.440.000	73.250.000	99,74%	99,74%
D	Pelaporan Penjaminan Mutu	221.492.000	36.720.000	184.772.000	183.416.594	99,27%	82,81%
521211	Belanja Bahan	8.628.000		8.628.000	8.141.270	94,36%	94,36%
521251	Belanja Jasa Profesi	14.000.000	-	14.000.000	14.000.000	100,00%	100,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.720.000	36.720.000	0	0	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	162.144.000		162.144.000	161.275.324	99,46%	99,46%
5731.BIC.002	Unit Kerja yang dilakukan Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi	473.483.000	274.141.000	199.342.000	195.283.975	97,96%	41,24%
51	Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi	473.483.000	274.141.000	199.342.000	195.283.975	97,96%	41,24%
A	Perencanaan Umum Penjaminan Mutu	14.603.000	8.000.000	6.603.000	5.552.385	84,09%	38,02%
521211	Belanja Bahan	6.603.000		6.603.000	5.552.385	84,09%	84,09%
521251	Belanja Jasa Profesi	8.000.000	8.000.000	0	0	-	0,00%
B	Perencanaan Penugasan Penjaminan Mutu	36.720.000		36.720.000	36.295.000	98,84%	98,84%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/RO KOMPONEN SUBKOM/AKUN/DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5)=(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.720.000		36.720.000	36.295.000	98,84%	98,84%
C	Pelaksanaan Penjaminan Mutu	303.000.000	151.500.000	151.500.000	148.945.590	98,31%	49,16%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Dinas	303.000.000	151.500.000	151.500.000	148.945.590	98,31%	49,16%
D	Pelaporan Penjaminan Mutu	119.160.000	114.641.000	4.519.000	4.491.000	99,38%	3,77%
521211	Belanja Bahan	6.300.000	1.781.000	4.519.000	4.491.000	99,38%	71,29%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	112.860.000	112.860.000	0	0	-	0,00%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama Manajemen Mutu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KUMM dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam menjamin mutu pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum, capaian kinerja KUMM pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, baik dari sisi pemenuhan indikator maupun capaian sasaran kegiatan (*output*), meskipun pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran

Keterbatasan anggaran yang signifikan berdampak pada penyesuaian target kinerja, khususnya pada kegiatan penjaminan mutu penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi. Namun demikian, KUMM tetap berupaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas melalui optimalisasi metode kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan penjaminan mutu secara *hybrid*. Upaya tersebut terbukti mampu memastikan capaian kinerja tetap memenuhi target yang telah disesuaikan, sekaligus menjaga validitas mutu produk pengawasan Ombudsman.

Kedepannya, KUMM berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan penjaminan mutu, pengelolaan aduan pelanggaran internal, serta penguatan sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik. LKj ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lampiran.1 pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025–2029

Kegiatan: 0701 - Manajemen Mutu							1.818	1.792	2.003	2.410	2.738	Ombudsman Republik Indonesia
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan												

- 68 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Publik secara Keseluruhan dan Eksternal sesuai Standar Mutu												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	1. Tingkat realisasi mutu atas prosedur pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman		99%	99%	99%	99%	99%						
	2. Rata-rata waktu penyelesaian sengketa		66,77 hari	65,94 hari	65,33 hari	64,91 hari	65,33 hari						
	Output												
	Akses terkecil kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman, RI yang diimplementasikan	Pusat	79 Orang	75 Orang	80 Orang	85 Orang	90 Orang	283	289	319	349	382	
	Unit Kerja yang Dilakukan Penempatan Mutu: Penelusuran Laporan	Pusat	20 Laporan	23 Laporan	26 Laporan	29 Laporan	32 Laporan	782	921	1.073	1.236	1.397	
	Unit Kerja yang Dilakukan Penempatan Mutu: akses Penanganan Maladministrasi	Pusat	18 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	474	382	761	825	938	

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kualitas tertinggi	38,15%
Terwujudnya Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik yang Efektif	Tingkat kepuasan pengawasan pelayanan Publik oleh Ombudsman	3,25 (skala 4)
	Indeks Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3,13 (skala 4)
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Persentase Laporan/ Pengaduan Masyarakat oleh Ombudsman RI yang Diselesaikan	85%
	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	89 Hari
	Rata-rata Waktu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	180 Hari
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Persentase Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang Dilaksanakan	70%
	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60%
Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik secara konsisten dan efektif sesuai standar mutu	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%
	Rata-rata Lama Penyelesaian Aduan	46,77 Hari

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp 44.882.000.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 210.709.019.000
Total	Rp 255.591.019.000

Jakarta, Januari 2025
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman Republik Indonesia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik secara konsisten dan efektif sesuai standar mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Ombudsman yang diselesaikan	70 Aduan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan	20 Laporan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	10 Laporan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Aduan terkait Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang Diselesaikan	Rp 262.963.000
Output 2: Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	Rp 782.452.000
Output 3: Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi	Rp 473.483.000
Total	Rp 1.518.898.000

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN MUTU,



Awidya Mahadewi

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman Republik Indonesia yang Telah Disesuaikan

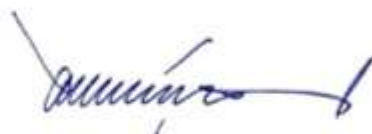
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Ombudsman yang diselesaikan	70 Aduan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan	8 Laporan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	4 Laporan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Penjaminan Mutu			
Aduan terkait Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang Diselesaikan	262.963.000	152.253.000	110.710.000
Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	782.452.000	442.433.000	340.019.000
Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi	473.483.000	274.141.000	199.342.000
Total	1.518.898.000	868.827.000	650.071.000

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN MUTU,

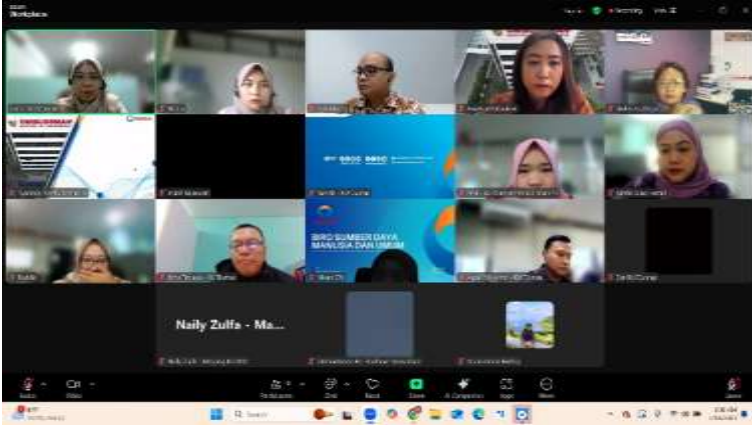







Awidya Mahadewi


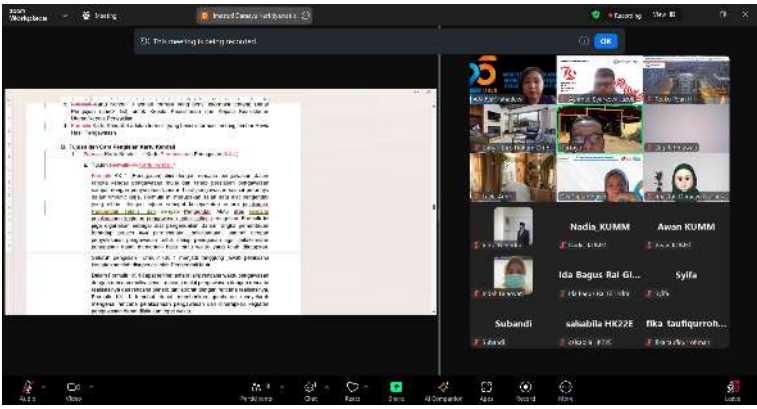
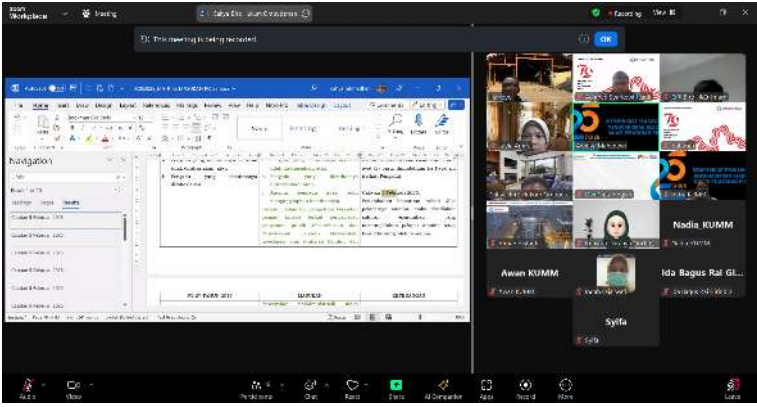
5. Dokumentasi Kegiatan

No.	Keterangan	Foto
1.	<p>Hari, tanggal: Kamis, 9 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
2.	<p>Hari, tanggal: Jumat. 10 Januari</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penilaian Arsip KUMM</p>	

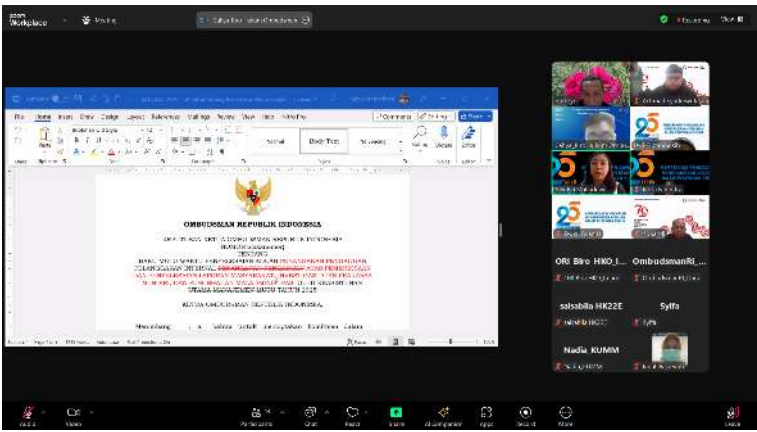

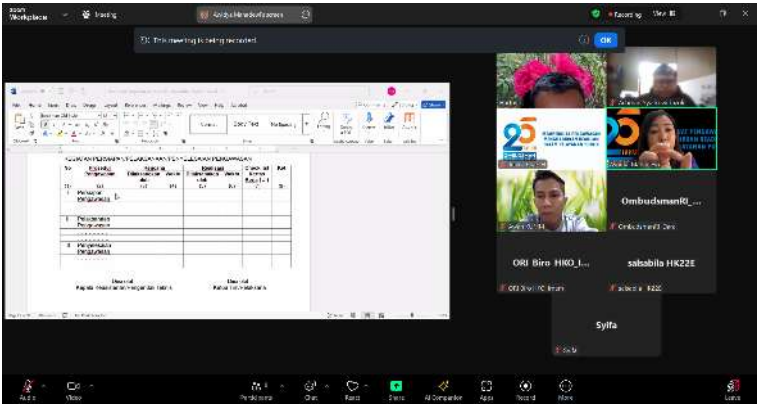
<p>3.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 13 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Permintaan Klarifikasi Aduan a.n Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 dengan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>4.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 13 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman RI</p>	
<p>5.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 14 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Rancangan Kerangka Acuan Kerja Bimbingan Teknis Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	




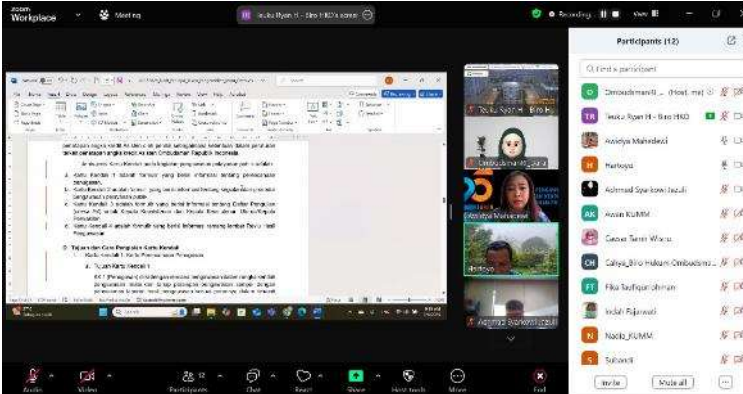
<p>6.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 16 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi persiapan Bimbingan Teknis PVL Tahun 2025</p>	
<p>7.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Monitoring hasil Penjaminan Mutu Pencegahan Perwakilan Kalimantan Utara</p>	
<p>8.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 21 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi KUMPM terkait Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi</p>	

<p>9.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 23 Januari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat internal KUMM Pembahasan Kertas Kerja Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Tahun 2025</p>	
<p>10.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 4 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat dengan KUMPM (Manajemen Pengetahuan)</p>	
<p>11.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 5 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Draf Nota Kesepahaman dan rencana tindak lanjut kerja sama antara Ombudsman RI dan BRIN</p>	

<p>12.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 5 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman RI</p>	
<p>13.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 11 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Pengendalian Mutu</p>	
<p>14.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 12 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System)</p>	

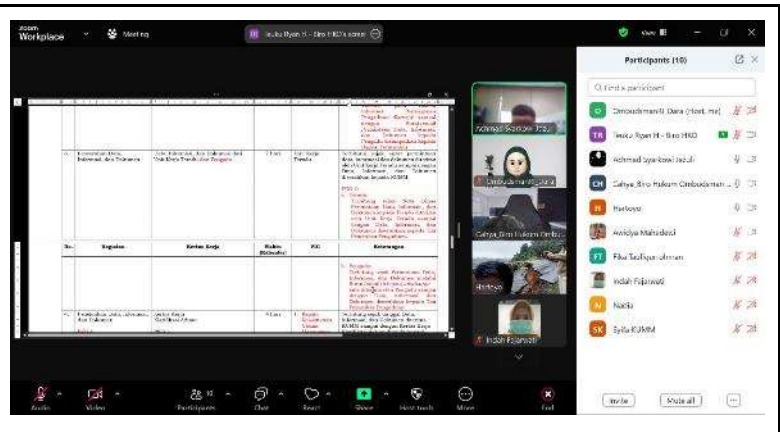
<p>15.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 13 Februari 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi Pelaksanaan Saran Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Kalimantan Utara dengan KUMPM</p>	
<p>16.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 18 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Pengendalian Mutu</p>	
<p>17.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 19 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Ombudsman RI</p>	

<p>18.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 20 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Rancangan SK Baku Mutu Waktu Penyelesaian Aduan Pelanggaran Internal oleh Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>19.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 24 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Bobot Indikator Penilaian Hasil Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan</p>	
<p>20.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 25 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Pengendalian Mutu</p>	

<p>21.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 26 Februari 2025</p> <p>Nama Kegiatan: <i>Coaching and Mentoring</i> Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia</p>	
<p>22.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 03 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Sosialisasi Dashboard SIMPeL</p>	
<p>23.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 03 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Koordinasi dengan Inspektorat, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, dan Keasistenan Utama V</p>	
<p>24.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 04 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Pengendalian Mutu</p>	

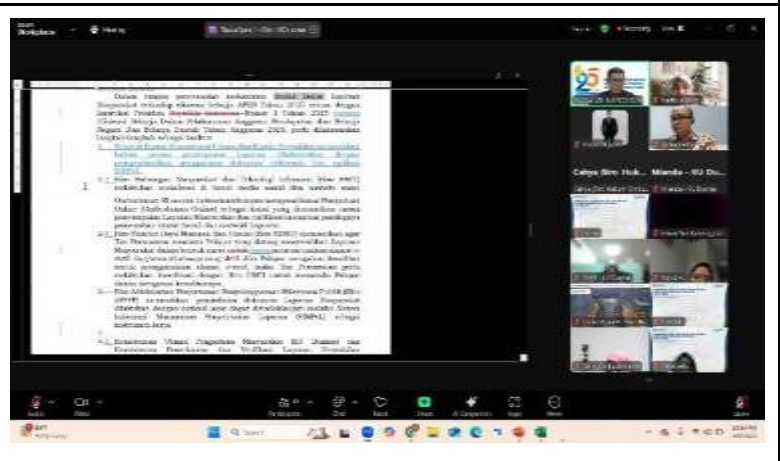
25. **Hari, tanggal:**
Selasa, 04 Maret 2025

Nama Kegiatan:
Rapat Pembahasan Rancangan SK Baku Mutu Waktu Penyelesaian Aduan Pelanggaran Internal oleh Keasistenan Utama Manajemen Mutu



26. **Hari, tanggal:**
Kamis, 06 Maret 2025

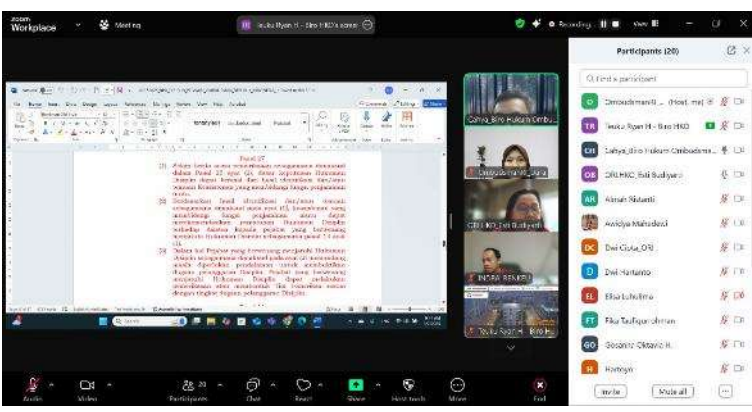

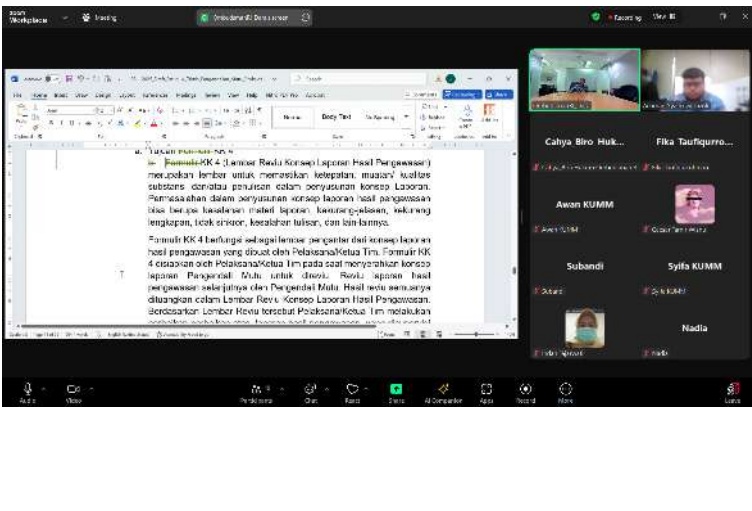
Nama Kegiatan:
Pembahasan Rancangan SE Ketua tentang Penyesuaian Mekanisme Tindak Lanjut Laporan Masyarakat pasca Inpres Nomor 1 tahun 2025

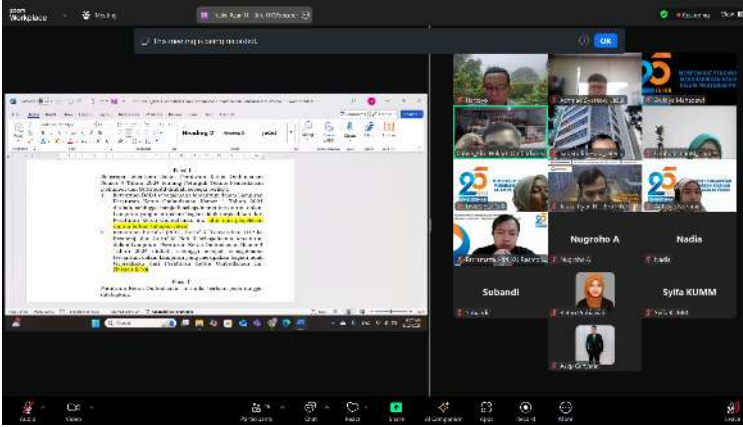




27. **Hari, tanggal:**
Kamis, 06 Maret 2025

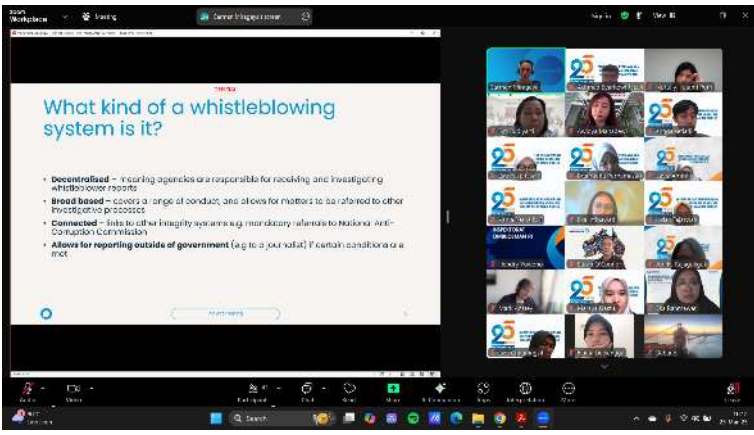
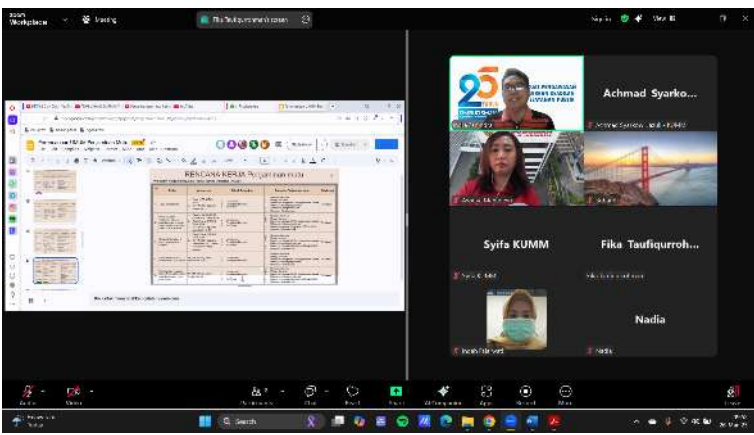

Nama Kegiatan:
Rapat Pembahasan Finalisasi Kertas Kerja Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Tahun 2025



<p>28.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 07 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Disiplin Pegawai</p>	
<p>29.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 10 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Hasil Penilaian Penjaminan Mutu</p>	
<p>30.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 11 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Pengendalian Mutu dan Pembahasan Rancangan SK Baku Mutu Waktu Penyelesaian Aduan Pelanggaran Internal oleh Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	

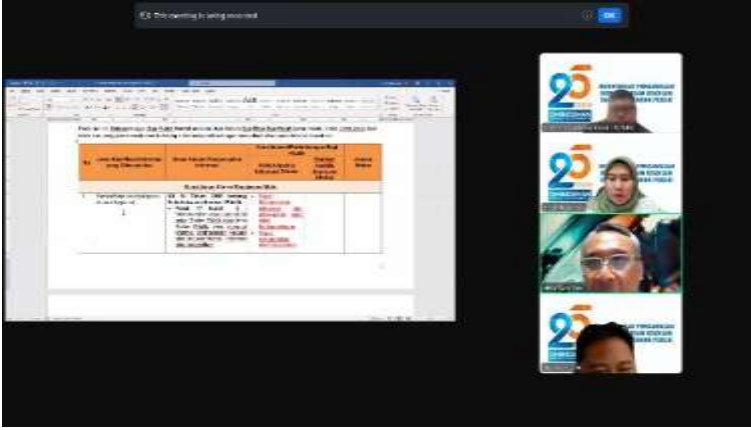


<p>31.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 12 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif</p>	
<p>32.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 12 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Hasil Penilaian Penjaminan Mutu</p>	
<p>33.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 13 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Program Kerja Tahunan Penjaminan Mutu dan Rencana Kerja Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	


<p>34.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 14 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Monitoring Kinerja Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>35.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 17 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Standar Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi</p>	
<p>36.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 18 Maret 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Standar Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi</p>	

<p>40.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa. 25 Maret 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Webinar on the Management of Whistle Blowing System based on ISO 19: ISO 37002 Year 2021</p>	
<p>41.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu. 26 Maret 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi</p>	
<p>42.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 16 April 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Perencanaan Penulisan Buku Manajemen Mutu Tahun 2025</p>	



<p>43.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 17 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>44.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 21 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Sumatera Utara</p>	
<p>45.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 21 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penyusunan Buku Manajemen Mutu Pengelolaan Pengaduan</p>	

<p>46.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 22 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Ombudsman Republik Indonesia</p>	
<p>47.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 25 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Kertas Kerja Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi</p>	
<p>48.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 28 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Ombudsman dalam Rangka Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud)</p>	

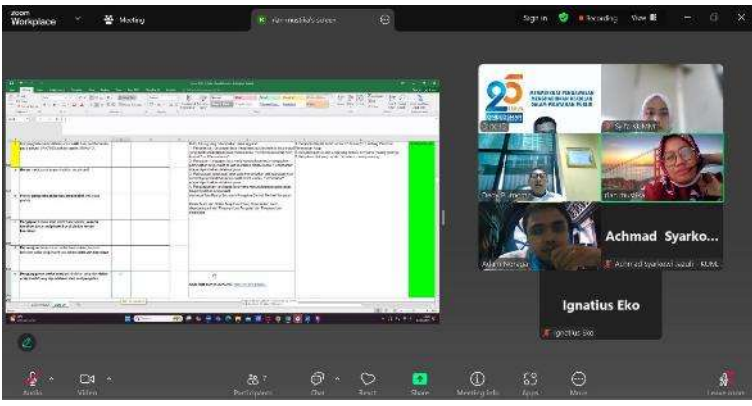


<p>49.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 29 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024</p>	
<p>50.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 30 April 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>51.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 02 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Koordinasi dan Pembahasan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud) di Lingkungan Ombudsman RI</p>	 <p>May 2, 2025 9:20:49 AM Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>


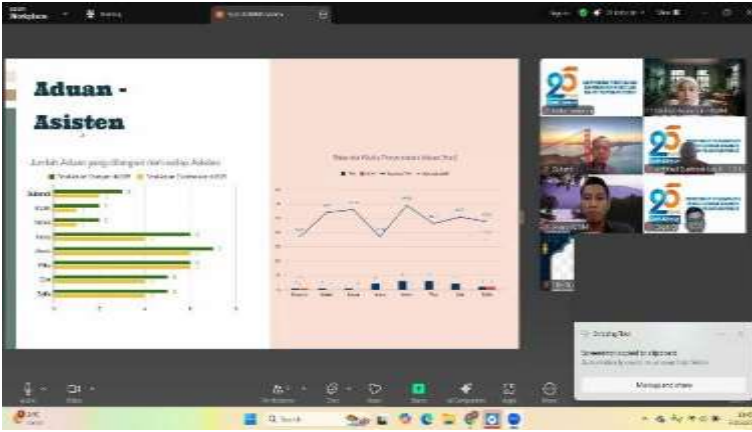

<p>52.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 05 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Penilaian Arsip</p>	
<p>53.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 07 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Kertas Kerja Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi</p>	
<p>54.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 07 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Draf Nota Kesepahaman dan rencana tindak lanjut kerja sama antara Ombudsman RI dan BRIN</p>	




<p>55.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 09 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Bahan Pra Rakernas KUMM Tahun 2025</p>	
<p>56.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 09 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan MoU antara Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi & Pemasaran</p>	
<p>57.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat. 09 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Kegiatan Kunjungan Parlemen Malaysia ke Ombudsman Republik Indonesia</p>	

<p>58.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 16 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Sosialisasi Standar Mutu berbasis Peraturan Ombudsman Nomor 51 Tahun 2021 tentang Manajemen Mutu Terpadu</p>	
<p>59.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 19 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Sosialisasi Rumah Subsidi bagi Insan Ombudsman</p>	
<p>60.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 27 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Perubahan Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif</p>	


<p>61.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 27 Mei 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Anggaran Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>62.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 03 Juni 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>63.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 05 Juni 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Perubahan Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substanti</p>	

<p>64.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 16 Juni 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Verifikasi Bukti Dukung Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025</p>	
<p>65.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 17 Juni 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penilaian Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Tahun 2025</p>	
<p>66.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 18 Juni 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat</p>	




<p>67.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 18 Juni 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Keasistenan Utama I</p>	
<p>68.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 02 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Monitoring Kinerja Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>69.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 03 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu & Penyampaian Hasil Penjaminan Mutu</p>	

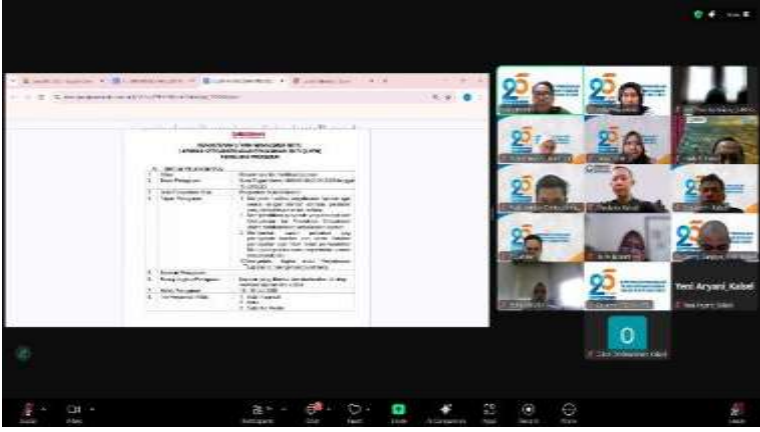


<p>70.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 07 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Keasistenan Utama I</p>	
<p>71.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 07 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Revisi Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Tahun 2025</p>	
<p>72.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 09 Juli 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Pengendalian Mutu dan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko</p>	





<p>73.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 10 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>74.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 10 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Ketua Ombudsman tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif</p>	
<p>75.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 11 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penyusunan Buku Manajemen Mutu Pengelolaan Pengaduan</p>	

<p>76.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 15 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko</p>	 <p>Jul 15, 2025 9:56:18 AM</p>
<p>77.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 16 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya</p>	
<p>78.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 16 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan</p>	

<p>79.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu,</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Maluku</p>	
<p>80.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 17 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>81.</p>		
<p>82.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 22 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Kalimantan Selatan</p>	



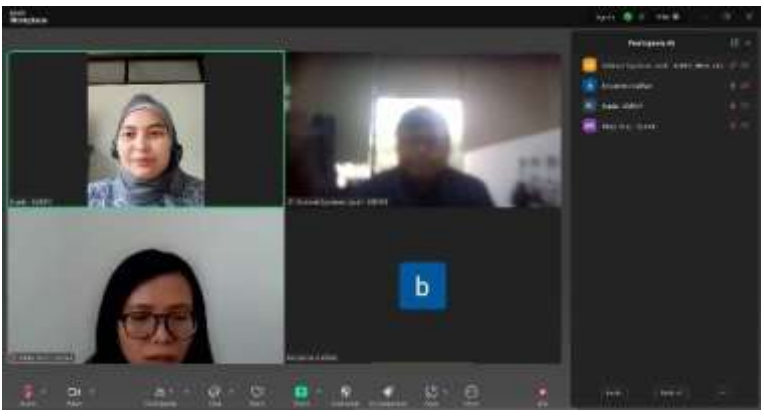
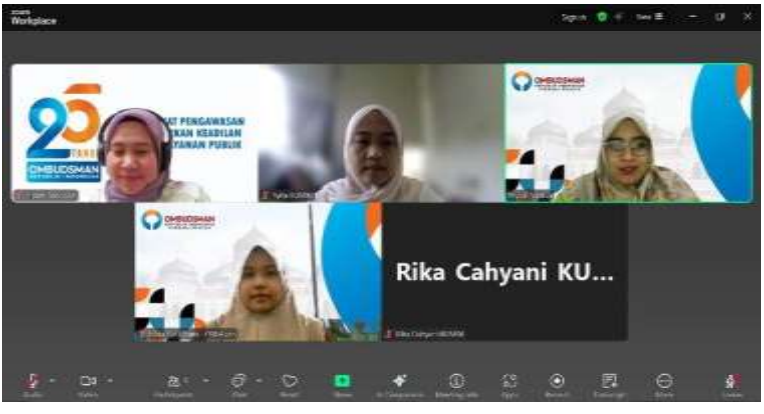
<p>83.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 23 Juli 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>84.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 23 Juli 2024</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Kalimantan Selatan</p>	
<p>85.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 24 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Ombudsman (RPO) tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System)</p>	




<p>86.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 25 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan</p>	
<p>87.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 25 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya</p>	
<p>88.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 25 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua</p>	

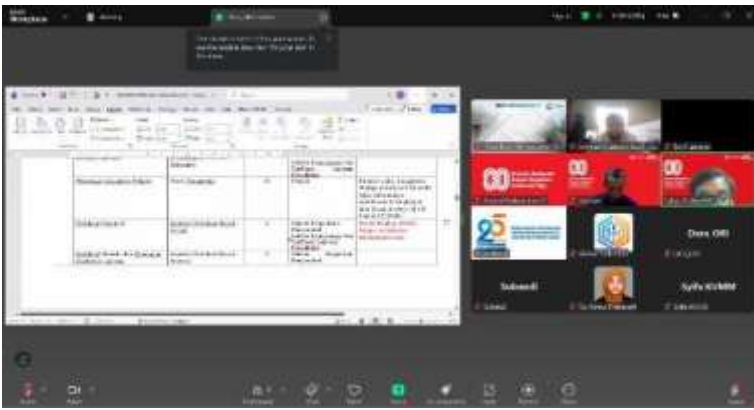


<p>89.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 28 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Baku Mutu Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan</p>	
<p>90.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 28 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Banten</p>	
<p>91.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 29 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025</p>	
<p>92.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa. 29 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat pembahasan perubahan Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif</p>	




<p>93.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 30 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Papua</p>	
<p>94.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 30 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penyusunan Buku Manajemen Mutu Pengelolaan Pengaduan</p>	
<p>95.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 30 Juli 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Anggaran Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	

<p>96.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 01 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Kertas Kerja Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	
<p>97.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 05 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>98.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 05 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua</p>	
<p>99.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Sulawesi Tenggara</p>	




<p>100.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Pembukaan Blokir Anggaran Ombudsman RI TA 2025</p>	
<p>101.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jawa Barat</p>	
<p>102.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Sumatera Utara</p>	
<p>103.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Aceh</p>	




<p>104.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 07 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjurangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia</p>	
<p>105.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 07 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>106.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 07 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Banten</p>	

<p>107.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 07 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ketua Ombudsman tentang Baku Mutu Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan</p>	
<p>108.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 08 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Disiplin Pegawai Ombudsman RI</p>	
<p>109.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 11 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (<i>Entry Meeting</i>) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Keasistenan Utama III</p>	

<p>110.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 11 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>111.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 12 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	
<p>112.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 12 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan DI Yogyakarta</p>	

<p>113.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 13 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Keasistenan Utama III</p>	
<p>114.</p>		
<p>115.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 14 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>116.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 19 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	

<p>117.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 19 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Keasistenan Utama VI</p>	
<p>118.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 20 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dengan Keasistenan Utama III</p>	
<p>119.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	





<p>120.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 22 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Penilaian Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	
<p>121.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 25 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi dengan Perwakilan Jawa Timur</p>	
<p>122.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 25 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi dengan Perwakilan Sumatera Utara</p>	

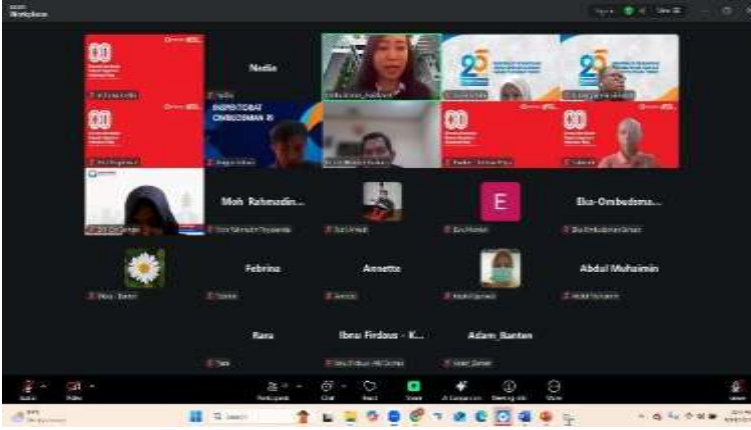
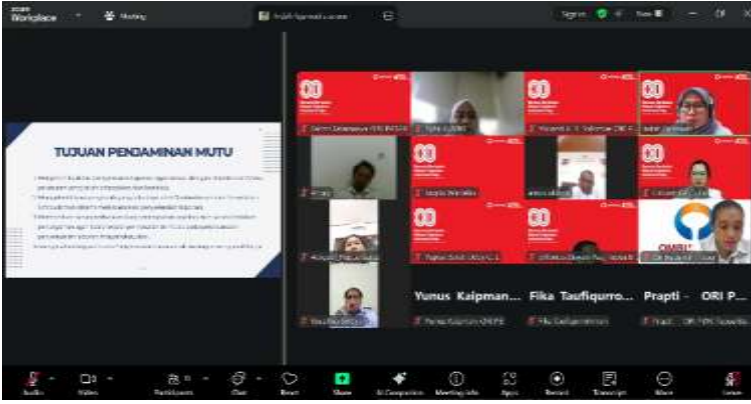

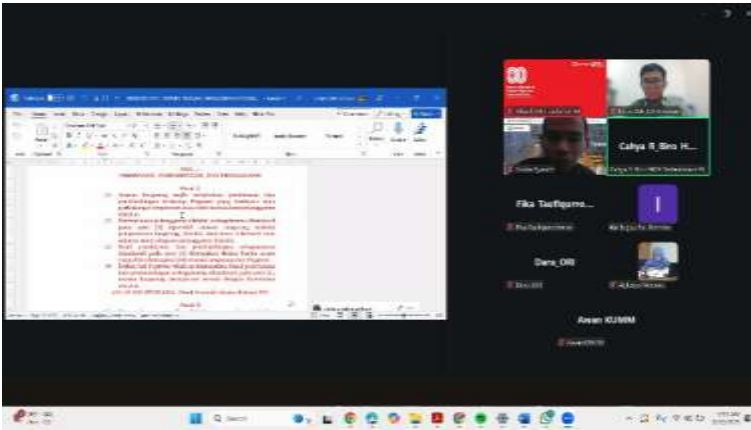
<p>123.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama VI</p>	
<p>124.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 29 Agustus 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Pengisian Basis Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2024 – 2025</p>	
<p>125.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 01 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi di Perwakilan Jawa Timur</p>	

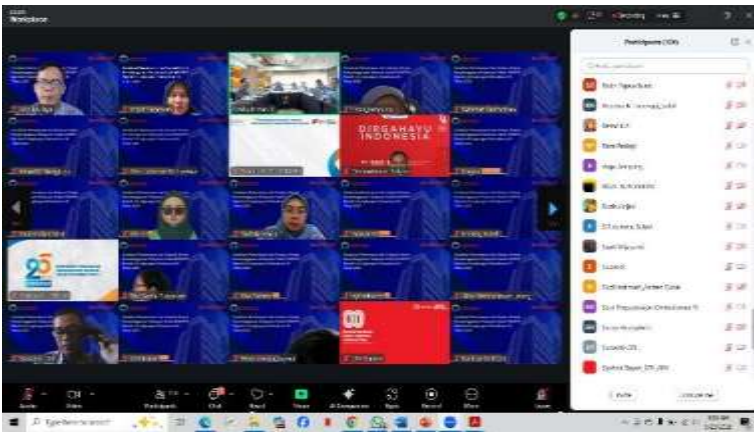

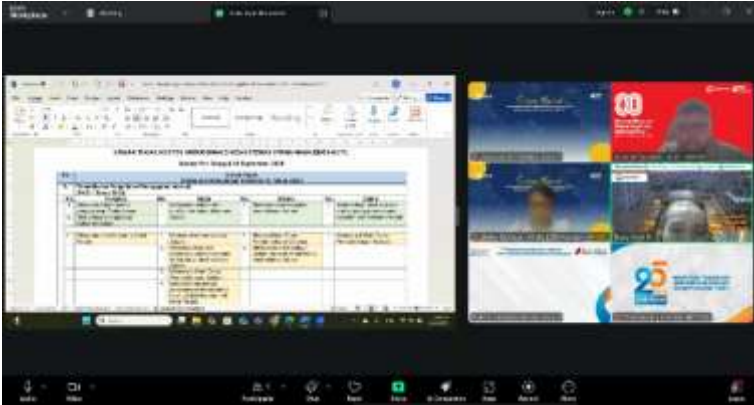
<p>126.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 01 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi di Perwakilan Sumatera Utara</p>	
<p>127.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 03 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian Mutu di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten</p>	
<p>128.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 03 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Akhir (<i>Exit Meeting</i>) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jawa Timur</p>	

<p>129.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 08 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pendahuluan (<i>Entry Meeting</i>) Penjaminan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Gorontalo</p>	
<p>130.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 09 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: <i>Focus Discussion Group (FGD)</i> terkait Rancangan Aplikasi e- Penjaminan Mutu Ombudsman RI</p>	
<p>131.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 10 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pengisian Penilaian Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Sumatera Utara dan Jawa Timur Tahun 2025</p>	

<p>132.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 11 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>133.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 12 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Pengisian Lanjutan Basis Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2021 – 2023</p>	
<p>134.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 15 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pendahuluan (<i>Entry Meeting</i>) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Maluku Utara</p>	

<p>135.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 15 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi di Perwakilan Gorontalo</p>	
<p>136.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 16 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Kalimantan Utara</p>	
<p>137.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 16 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung</p>	
<p>138.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 16 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Bimtek Policy Brief dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)</p>	


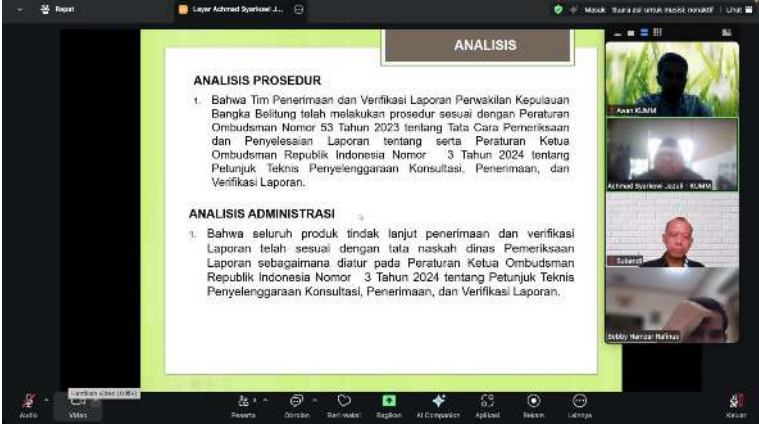
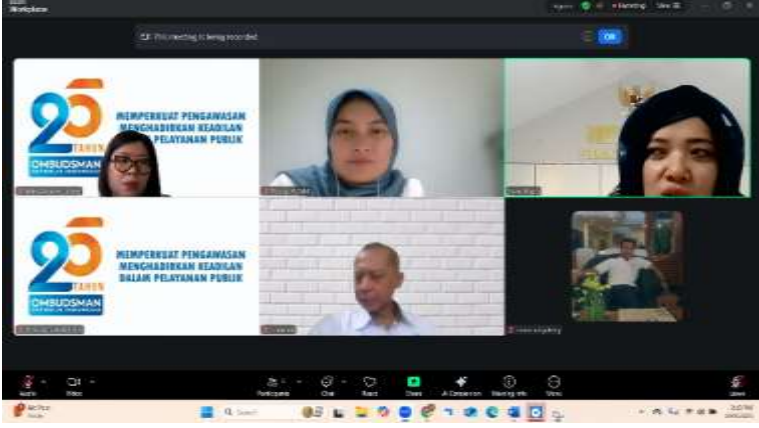
<p>139.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 19 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi WBS Aduan a.n Prion Sinurat</p>	
<p>140.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 22 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pendahuluan (<i>Entry Meeting</i>) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Papua Barat</p>	
<p>141.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 23 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Maluku Utara</p>	
<p>142.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 23 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Disiplin Pegawai Ombudsman RI</p>	

<p>143.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 23 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Sosialisasi Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025</p>	
<p>144.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 23 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Ombudsman RI</p>	
<p>145.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 24 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjurangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia</p>	




<p>146.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 25 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>147.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 25 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Buku Manajemen Mutu Tahun 2025</p>	
<p>148.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 25 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Perwakilan Maluku Utara</p>	
<p>149.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 29 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pembahasan Penyusunan Standar Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Laporan Masyarakat di Ombudsman RI</p>	

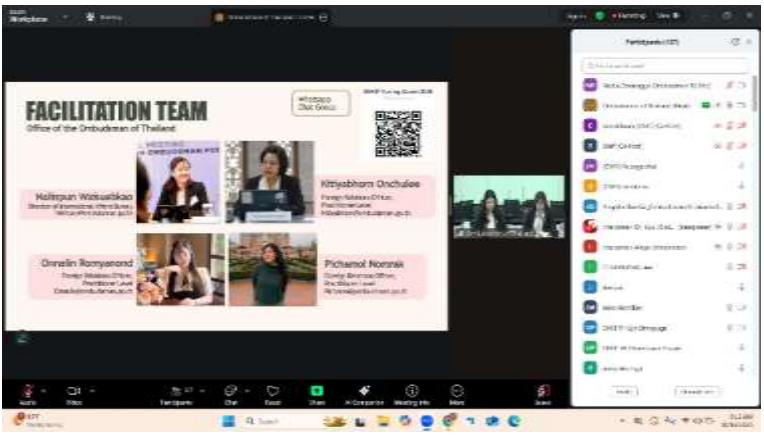
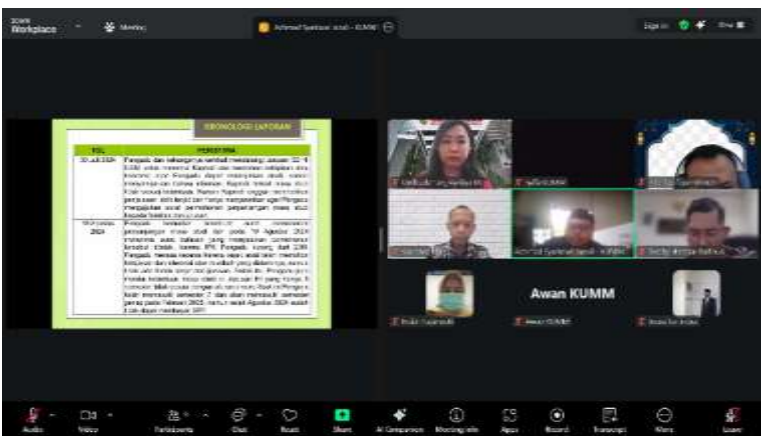

150.		
151.	<p>Hari, tanggal: Senin, 29 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduani dengan Perwakilan Banten</p>	
152.	<p>Hari, tanggal: Selasa, 30 September 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsultasi Tindak Lanjut Aduan atas nama a.n Ayu Hidayah Aslamiah</p>	




<p>153.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 01 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan D I Yogyakarta</p>	
<p>154.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 01 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pimpinan Ombudsman RI</p>	
<p>155.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 01 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Harmonisasi Rancangan Peraturan Ombudsman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Internal</p>	




<p>156.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 02 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman RI Tahun 2025</p>	
<p>157.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 02 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>158.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 06 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Jawa Tengah</p>	

<p>159.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 09 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi Aduan Noer Kasanah dengan Inspektorat</p>	
<p>160.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 09 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Penyusunan SOP Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>161.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 10 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Pengisian Basis Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	

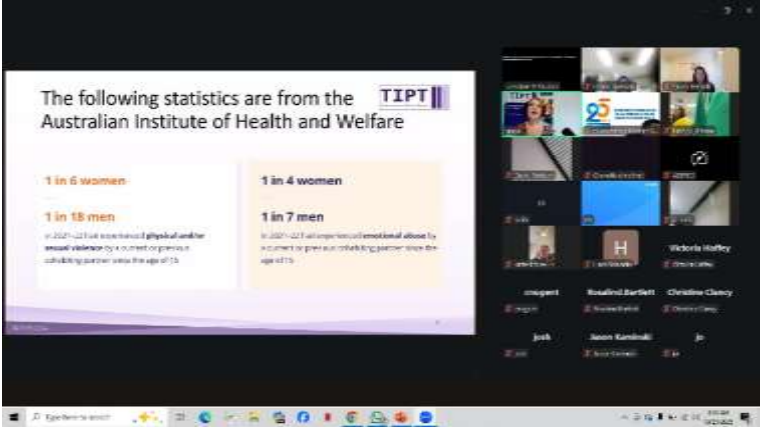


<p>162.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 10 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama VI</p>	
<p>163.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 13 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>164.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 14 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Standar Mutu Penerimaan dan Verifikasi Laporan</p>	


<p>165.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 14 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pelatihan South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF)</p>	
<p>166.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 14 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>167.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 15 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	

<p>168.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pelatihan South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF)</p>	
<p>169.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>170.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Kalimantan Selatan</p>	

<p>171.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 20 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Sulawesi Tenggara</p>	
<p>172.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 20 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama III</p>	
<p>173.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Rancangan Aplikasi e-Penjaminan Mutu Ombudsman RI</p>	

<p>174.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Pencegahan Malamministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>175.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 24 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan D I Yogyakarta</p>	
<p>176.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 29 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jawa Tengah</p>	

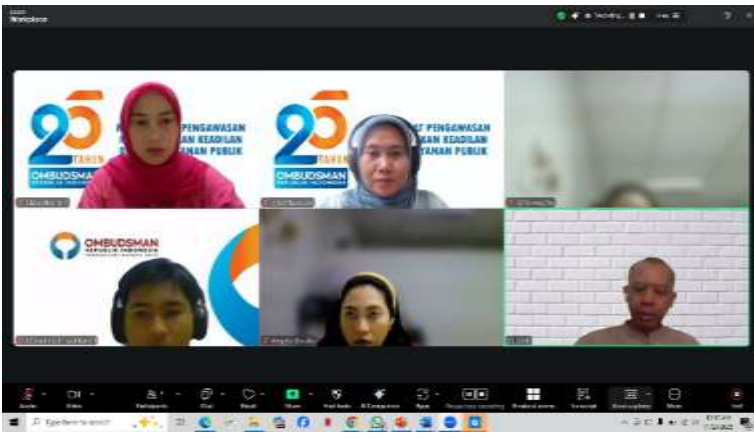



<p>177.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 29 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan:</p> <p>Complaint Handling Forum Office of the Commonwealth Ombudsman</p>	
<p>178.</p>		
<p>179.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 30 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>180.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 31 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Papua</p>	

<p>181.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 31 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Penyusunan Bahan Rakernas, Penyusunan Buku Memori Serah Terima Jabatan Wakil Ketua dan Penyusunan Bahan Rapat Intensif di Bali</p>	
<p>182.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 03 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>183.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 05 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	

<p>184.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 10 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jambi</p>	
<p>185.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 10 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Sumatera Utara</p>	
<p>186.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 18 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Evaluasi Penilaian Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi tahun 2025</p>	




<p>187.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 19 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama II</p>	
<p>188.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 20 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Finalisasi Penilaian hasil Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi</p>	
<p>189.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 21 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Finalisasi Penilaian hasil Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi</p>	

<p>190.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 24 November</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Maluku</p>	
<p>191.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 25 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Perencanaan Kegiatan <i>Launching</i> Buku Manajemen Mutu Ombudsman RI</p>	
<p>192.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 27 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	


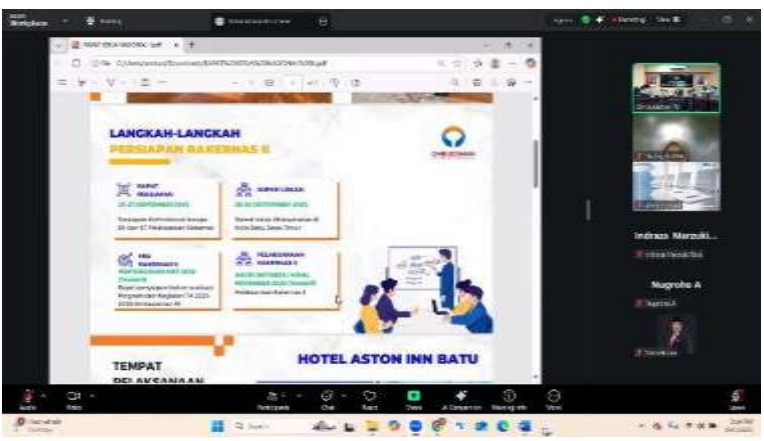

<p>193.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 28 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>194.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 01 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Monitoring Persiapan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema "Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik"</p>	
<p>195.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 01 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Kalimantan Barat</p>	
<p>196.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 04 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	


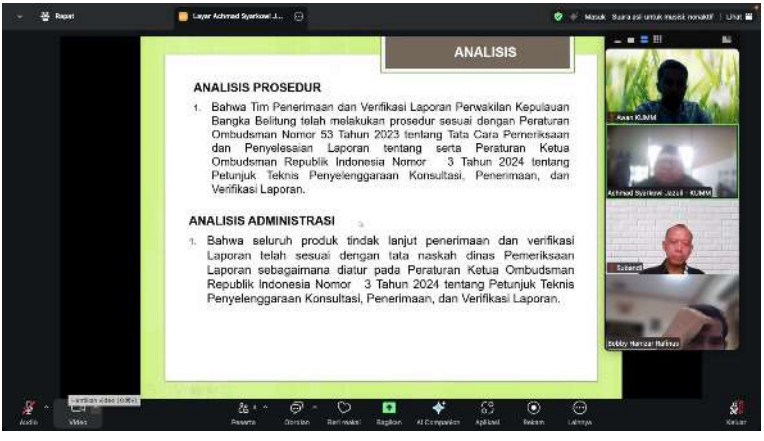
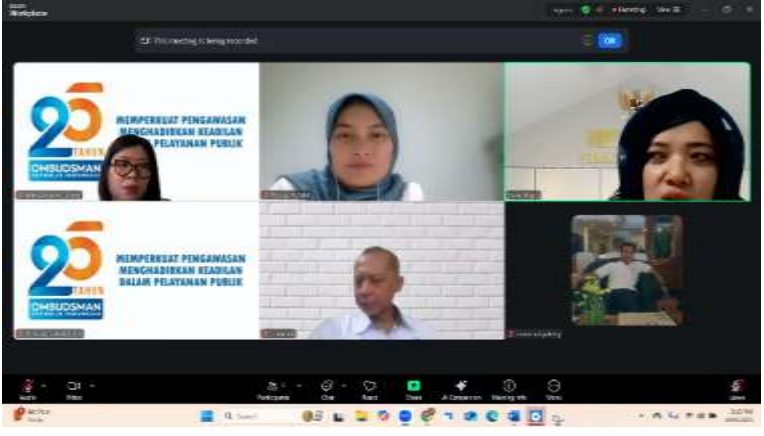
<p>197.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 08 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi Pelaksanaan FGD dengan tema “<i>Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik</i>”</p>	
<p>198.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 08 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Gladibersih <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) tema “<i>Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik</i>”</p>	
<p>199.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 09 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema “<i>Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik</i>”</p>	

<p>200.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 12 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>201.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 15 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama V</p>	
<p>202.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 15 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pemutakhiran Database Penjaminan Mutu</p>	

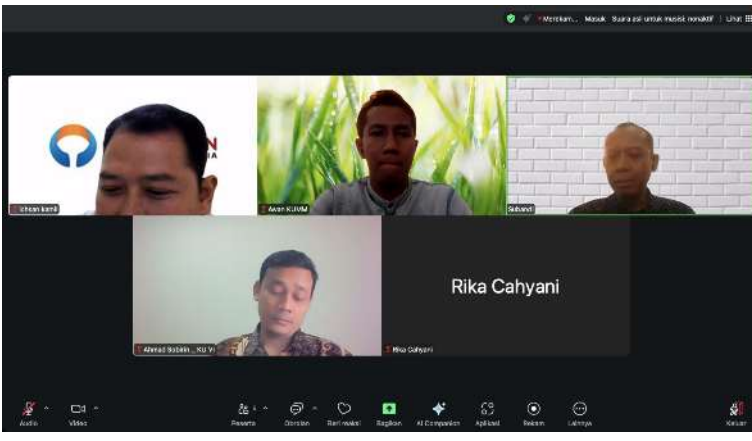


<p>203.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 16 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Monitoring Kinerja Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>204.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 17 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Penyusunan Rekapitulasi Temuan dan Pelaksanaan Rekomendasi Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>205.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 18 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Sumatera Utara</p>	

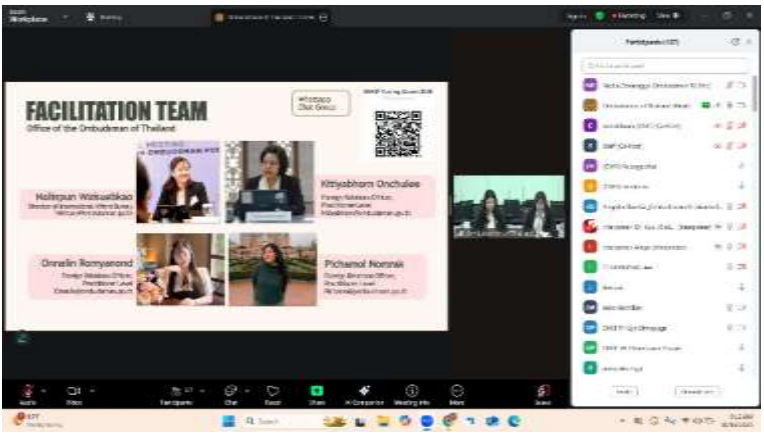
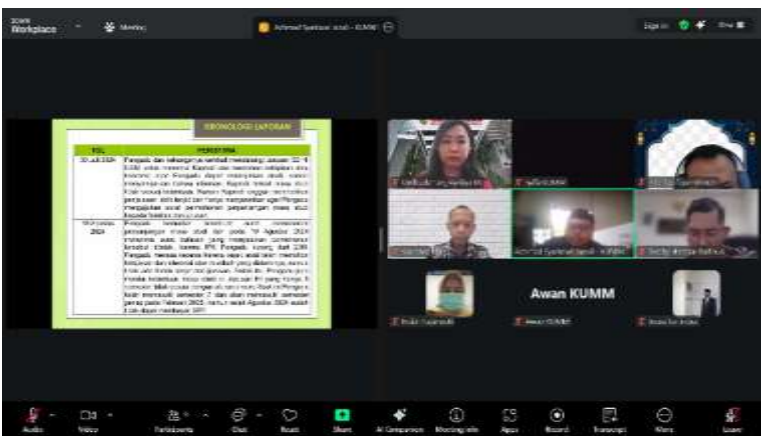

<p>206.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 18 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pemutakhiran Data Aduan WBS Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>207.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 19 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>208.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 23 Desember 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Monitoring Hasil Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	




<p>209.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 01 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan D I Yogyakarta</p>	
<p>210.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 01 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pimpinan Ombudsman RI</p>	
<p>211.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 01 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Harmonisasi Rancangan Peraturan Ombudsman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Internal</p>	




<p>212.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 02 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman RI Tahun 2025</p>	
<p>213.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 02 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>214.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 06 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Jawa Tengah</p>	

<p>215.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 09 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Koordinasi Aduan Noer Kasanah dengan Inspektorat</p>	
<p>216.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 09 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Penyusunan SOP Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>217.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 10 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Pengisian Basis Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2025</p>	

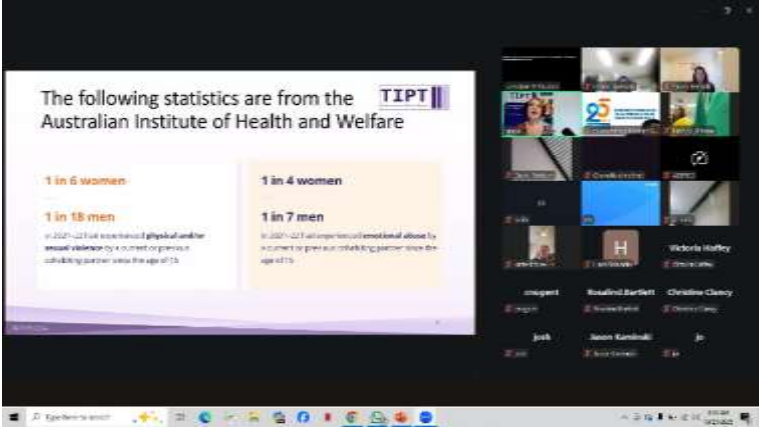



<p>218.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 10 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama VI</p>	
<p>219.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 13 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Pendahuluan (Entry Meeting) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>220.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 14 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Standar Mutu Penerimaan dan Verifikasi Laporan</p>	

<p>221.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 14 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pelatihan South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF)</p>	
<p>222.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 14 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>223.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 15 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	

<p>224.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pelatihan South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF)</p>	
<p>225.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Wawancara Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>226.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Kalimantan Selatan</p>	

<p>227.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 20 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi dengan Perwakilan Sulawesi Tenggara</p>	
<p>228.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 20 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama III</p>	
<p>229.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Pembahasan Rancangan Aplikasi e-Penjaminan Mutu Ombudsman RI</p>	

<p>230.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Pertemuan Akhir (Exit Meeting) Penjaminan Mutu Pencegahan Malamministrasi Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>231.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 24 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan D I Yogyakarta</p>	
<p>232.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 29 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jawa Tengah</p>	

<p>233.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu. 29 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan:</p> <p>Complaint Handling Forum Office of the Commonwealth Ombudsman</p>	
<p>234.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis. 30 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan:</p> <p>Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	
<p>235.</p>		
<p>236.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 31 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan:</p> <p>Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Papua</p>	

<p>237.</p>	<p>Hari, tanggal: Jumat, 31 Oktober 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Penyusunan Bahan Rakernas, Penyusunan Buku Memori Serah Terima Jabatan Wakil Ketua dan Penyusunan Bahan Rapat Intensif di Bali</p>	
<p>238.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 03 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jakarta Raya</p>	
<p>239.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 05 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Bedah Aduan Keasistenan Utama Manajemen Mutu</p>	

<p>240.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 10 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Jambi</p>	
<p>241.</p>	<p>Hari, tanggal: Senin, 10 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Perwakilan Sumatera Utara</p>	
<p>242.</p>	<p>Hari, tanggal: Selasa, 18 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Evaluasi Penilaian Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi tahun 2025</p>	

<p>243.</p>	<p>Hari, tanggal: Rabu, 19 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Rapat Permintaan Klarifikasi Aduan dengan Keasistenan Utama II</p>	
<p>244.</p>	<p>Hari, tanggal: Kamis, 20 November 2025</p> <p>Nama Kegiatan: Konsinyering Finalisasi Penilaian hasil Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi</p>	

Tim Penyusun

Awidya Mahadewi

Syifa Nur Awalia

Ignatius Eko Budiyantoro



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920

 (021) 2251 3737
137 (Call Center)



OmbudsmanRI137